

ABSTRAK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berikut peraturan pelaksanaannya, telah menetapkan ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Pemberian ganti kerugian dilakukan dengan menyelesaikan setiap tahapan-tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yakni Inventarisasi dan Identifikasi, Penetapan Penilaian, Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti kerugian, pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberian ganti kerugian apakah sudah layak dan adil bagi pihak yang berhak dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pertanahan di pengadilan nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Lgs.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan data sekunder diperoleh melalui studi Pustaka terhadap buku-buku, referensi atau sumber bacaan buku lainnya. data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian diketahui bahwa: (1) proses pemberian ganti kerugian pengadaan tanah pelebaran Jalan Karang Anyar – Gang Kurnia di Kota Langsa sudah layak dan adil serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) Pertimbangan Hakim dalam putusannya mengedepankan asas-asas pengadaan tanah diantaranya asas Kemanusiaan, Keadilan dan Kemanfaatan. Proyek Pelebaran jalan Karang Anyar-Gang Kurnia di Kota Langsa sangat berdampak positif bagi masyarakat, karena jalan umum akan mempermudah akses masyarakat khususnya di daerah Kota Langsa.

Kata Kunci: ganti kerugian, layak adil, pengadaan tanah, tinjauan hukum.

ABSTRACT

Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for the Public Interest, along with its implementing regulations, has established that compensation is fair and justifiable for parties entitled in the land acquisition process. The provision of compensation is carried out by completing each stage of land acquisition for public interest development, namely Inventory and Identification, Assessment Determination, Consultation on the Form of Compensation, compensation provision, and release of rights.

The purpose of this research is to determine whether the process of providing compensation is fair and justifiable for the entitled parties and to understand the underlying considerations of judges in deciding land disputes in court case number: 1/Pdt.G/2022/PN Lgs.

The research method used is a normative juridical approach using a statutory approach. The research specification used is descriptive-analytical. The data collection technique used is primary data obtained through legislation and court decisions, and secondary data obtained through literature studies of books, references, or other reading sources. The obtained data is then analyzed qualitatively.

The research results show that: (1) the process of providing compensation for the land acquisition of the Karang Anyar Road - Gang Kurnia widening project in Langsa City is fair, justifiable, and in accordance with the legislation; (2) The judge's consideration in the decision emphasizes the principles of land acquisition, including the principles of Humanity, Justice, and Benefit. The Karang Anyar Road - Gang Kurnia widening project in Langsa City has a significant positive impact on the community, as the public road will facilitate access for the community, especially in the Langsa City area.

Keywords: compensation, fair and justifiable, land acquisition, legal review.